



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 38 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN VISI DAN MISI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA TERPILIH TAHUN 2017-2022 MENJADI TUJUAN, SASARAN, STRATEGI,  
KEBIJAKAN UMUM DAN INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI  
KEBUTUHAN PENDANAAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2018-2022**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 serta menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 794 Tahun 2017 tentang Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2022, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
  2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
  3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
  4. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
  5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
  9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Inspektur, Para Kepala Badan, Para Kepala Dinas, Para Walikota, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris DPRD dan Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta agar melakukan Penjabaran Visi dan Misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta terpilih tahun 2017-2022 sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi unitnya masing-masing menjadi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum dan indikasi rencana program disertai kebutuhan pendanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan mengacu pada pedoman penjabaran, penjabaran dan indikator kinerja kunci sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III paling lambat 8 September 2017.

**KEDUA** : Para Asisten Sekretaris Daerah agar mengoordinir dan mensupervisi hasil penyusunan Penjabaran Visi dan Misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta terpilih tahun 2017-2022 menjadi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum dan indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasinya masing-masing.

- KETIGA : Inspektur, Para Kepala Badan, Para Kepala Dinas, Para Walikota, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris DPRD dan Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta agar melaporkan hasil penyusunan penjabaran Visi dan Misi Gubernur tersebut kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Para Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- KEEMPAT : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar menghimpun dan mengolah Hasil Penjabaran Visi dan Misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta terpilih tahun 2017-2022 menjadi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum dan indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan seluruh SKPD ke dalam dokumen awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Agustus 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



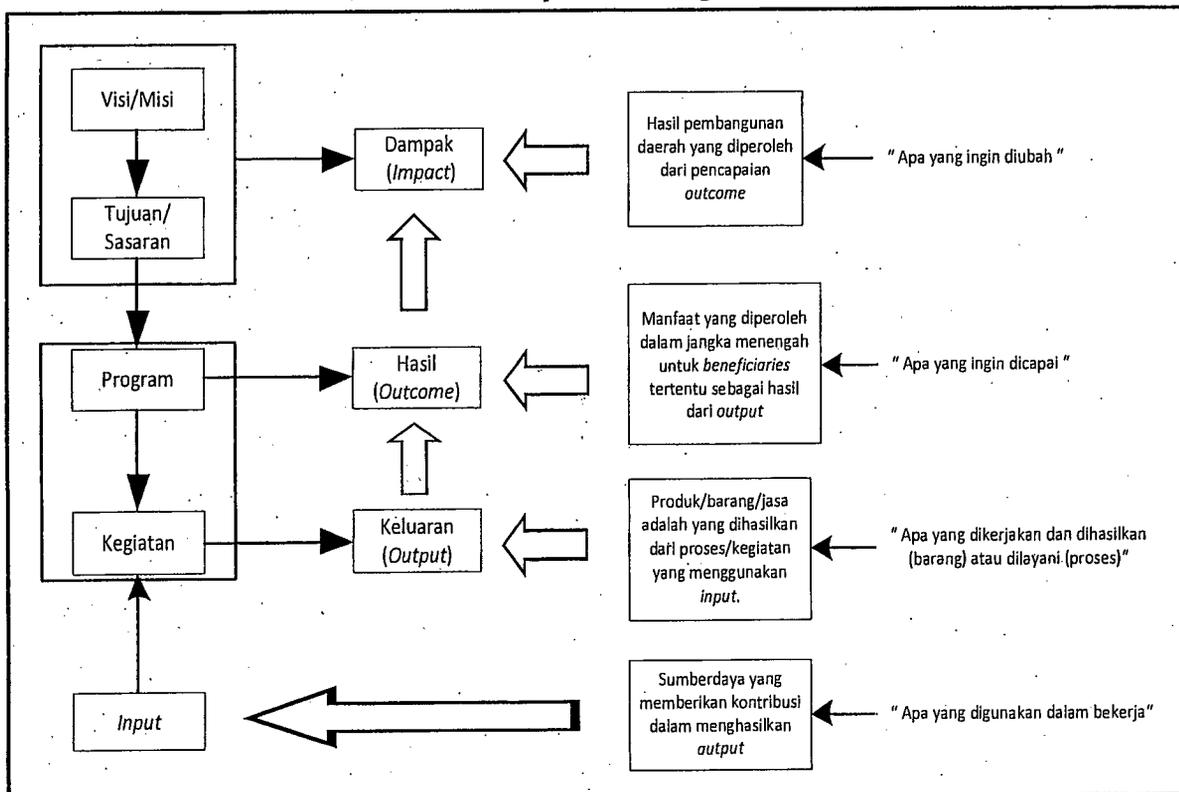
Saefullah

NIP. 196402111984031002

**PEDOMAN PENJABARAN VISI DAN MISI GUBERNUR DKI JAKARTA TERPILIH  
 TAHUN 2018-2022 MENJADI TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN UMUM, DAN  
 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN  
 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJMD PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
 JAKARTA TAHUN 2018-2022**

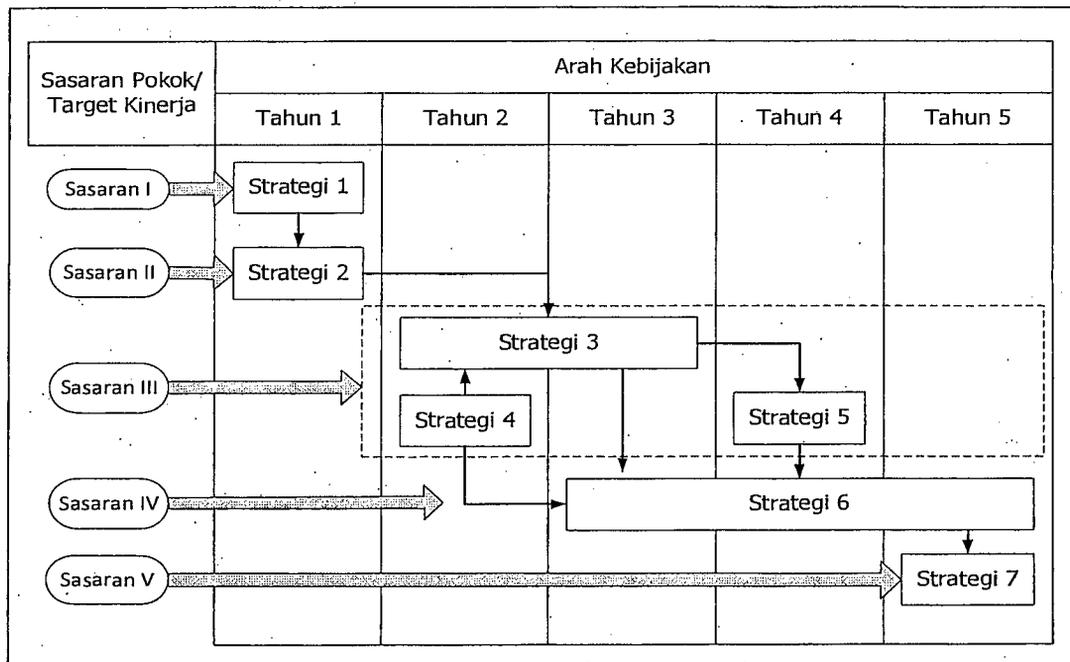
1. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria suatu rumusan tujuan pembangunan:
  - a. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
  - b. Untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
  - c. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
  - d. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.
  
2. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
  - b. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
  - c. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
  - d. Memenuhi kriteria SMART-C.

Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah



Sumber: Lampiran III Permendagri 54/2010

### Strategi Pelaksanaan Arah Kebijakan



Sumber: Lampiran III Permendagri 54/2010

3. Dari diagram di atas, strategi harus dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Strategi dapat dijalankan dari atas dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan waktu lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan strategi harus menjadi strategi pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintahan daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.
4. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui kebijakan umum diperoleh cerita strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya. Kriteria suatu rumusan kebijakan umum antara lain:

- a. Menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional dan fokus;
- b. Mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
- c. Mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

5. Perumusan indikator kinerja dan capaian kinerja tersebut harus dapat digunakan untuk mengukur capaian keberhasilan program pembangunan jangka menengah daerah, dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:
- a. Relevant, yaitu indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran strategis.
  - b. Well Defined, yaitu definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan.
  - c. Measurable, yaitu indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas atau harga.
  - d. Appropriate, yaitu indikator yang dipilih harus sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja.
  - e. Reliable, yaitu indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja.
  - f. Verifiable, yaitu memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator.
  - g. Cost-effective, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C).

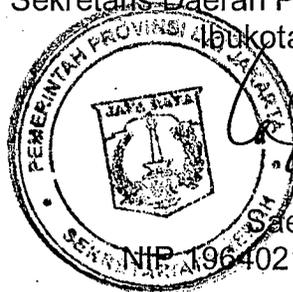
Namun, disadari bahwa penentuan suatu indikator kinerja atas kegiatan, program, atau sasaran bukan hal yang mudah. Kualitasnya ditentukan sejauh mana indikator benar-benar dapat mewakili (perilaku) dari kegiatan, program, atau sasaran yang diukur. Kualitas indikator kinerja ditentukan oleh:

- a. tingkat validitas indikator kinerja ditentukan berdasarkan tingkat kedekatan indikator kinerja tersebut dengan tujuannya. Tingkat validitas indikator kinerja dibagi menjadi:
  1. Exact : ukuran yang ideal untuk mengukur hasil pencapaian sasaran strategis yang diharapkan.
  2. Proxy : indikator yang mengukur hasil tidak secara langsung, tetapi sesuatu yang mewakili hasil tersebut.
  3. Activity : indikator kinerja yang mengukur jumlah, biaya, dan waktu dari kegiatan-kegiatan yang berdampak pada sasaran strategis yang bersangkutan.

Indikator kinerja dipilih seyogyanya merupakan indikator kinerja exact. Karena indikator dimaksud memiliki gap mendekati nol atau sama sekali tidak ada gap dalam menjelaskan. Dalam hal karena kesulitan dalam mendapatkannya, dimungkinkan digunakannya indikator proxy atau activity dengan catatan bahwa terus diupayakan untuk mendapatkan (yang mengarah pada) indikator exact.

6. Perumusan Indikator kinerja berpedoman pada :
- Keputusan Gubernur Nomor 642 Tahun 2017 tentang Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018.
  - Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD (Lampiran III).
  - Indikator SDG's sesuai dengan lampiran Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
  - Standar Pelayanan Minimal (SPM) masing-masing Urusan Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Maefullah

NIP. 196402111984031002

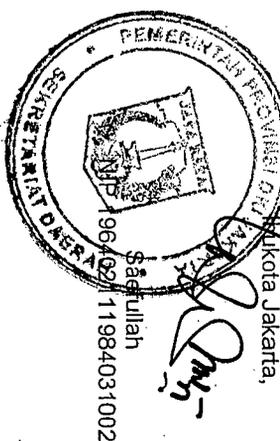


No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan
		30	Kawasan Kumuh	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100\%$
5	Tata Ruang	31	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	$\frac{\text{Luas ruang terbuka hijau}}{\text{Luas wilayah}} \times 100\%$
6	Perencanaan Pembangunan	32	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak
		33	Tersedianya Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/tidak
		34	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/tidak
		35	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	$\frac{\text{Jumlah program RKPD tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100\%$
7	Perumahan	36	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$
		37	Lingkungan Permukiman Kumuh	$\frac{\text{Luas lingkungan permukiman kumuh}}{\text{Luas wilayah}} \times 100\%$
		38	Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah di wilayah pada tbs.}} \times 100\%$
8	Kepemudaan & Olahraga	39	Gelanggang/Balai Remaja (selain milik swasta)	$\frac{\text{Jumlah gelanggang/balai remaja di Kota}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$
		40	Lapangan Olahraga	$\frac{\text{Jumlah lapangan olahraga di Kota}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$ <p>Lapangan olahraga adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lapangan sepakbola, m lap</li> <li>2. lapangan basket, m lap</li> <li>3. lapangan volley, m lap</li> <li>4. lapangan bulu tangkis, m lap</li> <li>5. lapangan catur, m lap</li> </ol>
9	Penanaman Modal	41	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	$\frac{\text{Realisasi PMDN thn 2018} - \text{Realisasi PMDN 2015}}{\text{Realisasi PMDN 2015}} \times 100\%$
10	Koperasi & UMKM	42	Koperasi Aktif	$\frac{\text{Jumlah Koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$
		43	Usaha Mikro dan Kecil	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro dan kecil}}{\text{Jumlah seluruh UKM}} \times 100\%$
11	Kependudukan dan Catatan Sipil	44	Kepemilikan KTP	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah)}} \times 100\%$
		45	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$
		46	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah/belum
12	Ketenagakerjaan	47	Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh	$\frac{\text{Jumlah pekerja/buruh peserta program Jamsostek aktif}}{\text{Jumlah pekerja/buruh}} \times 100\%$
		48	Pencari kerja yang ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang mendaftar}} \times 100\%$
13	Ketahanan Pangan	49	Regulasi ketahanan pangan	Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda,perkada, dsb.
		50	Ketersediaan pangan utama	$\frac{\text{Rata2 Jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$
14	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	51	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100\%$
		52	Angka melek huruf perempuan usia 15 th ke atas	$\frac{\text{Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf}}{\text{Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun}} \times 100\%$
		53	Partisipasi angkatan kerja perempuan	$\frac{\text{Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan}}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan}} \times 100\%$
15	KB & KS	54	Prevalensi peserta KB Aktif	$\frac{\text{Jumlah peserta program KB aktif}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$
		55	Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan}}{\text{PLKB/PKB}} \times 100\%$
16	Perhubungan	56	Angkutan Darat	$\frac{\text{Jumlah angkutan darat}}{\text{Jumlah penumpang angkutan darat}}$
17	Komunikasi & Informatika	57	Web site milik pemerintah daerah	Ada / tidak
		58	Pameran/expo	Menunjukkan Jumlah pameran/expo per tahun
18	Pertanahan	59	Luas lahan bersertifikat	$\frac{\text{Luas lahan bersertifikat di suatu daerah}}{\text{Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah}} \times 100\%$
		60	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	$\frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus yang terdaftar}} \times 100\%$
		61	Penyelesaian Ijin Lokasi	$\frac{\text{Jumlah Ijin Lokasi}}{\text{Permohonan Ijin Lokasi}} \times 100\%$
19	Kebang & Politik	62	Kegiatan Pembinaan Politik di Daerah	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan politik di daerah
		63	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
20	Otonomi Daerah	64	Sistem Informasi Manajemen Pemda	Menunjukkan Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs
		65	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda

**KETERANGAN :**

- Kolom (1) Uraian nama urusan pemerintahan daerah.
- Kolom (2) Uraian nama program.
- Kolom (3) diisi dengan uraian indikator kinerja program (outcome). Untuk urusan wajib pelayanan Dasar diwajibkan menggunakan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Kolom (4) diisi dengan kondisi kinerja pada awal RPJMD
- Kolom Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan untuk setiap basis program, diisi sebagai berikut
  - a. Kolom Tahun-1 (tahun pertama periode RPJMD):
  - Kolom (5) diisi dengan jumlah/besaran target kinerja program (outcome) yang akan dicapai pada tahun pertama periode RPJMD untuk setiap program berkenaan.
  - Kolom (6) diisi dengan jumlah pendanaan pada tahun pertama periode RPJMD yang dibutuhkan untuk mendanai program berkenaan guna mencapai target kinerja program (outcome) yang ditetapkan.
- Cara pengisian Kolom (7) sampai dengan kolom (14) yang terdapat mulai dari kolom Tahun-2 (tahun kedua periode RPJMD) sampai dengan kolom Tahun-5 (tahun kelima periode RPJMD), dilakukan sama dengan cara pengisian kolom (5) dan kolom (6) pada kolom Tahun 1 (tahun pertama periode RPJMD):
  - b. Kolom (Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD):
  - Kolom (15) diisi dengan jumlah/besaran target kinerja program (outcome) yang akan dilajuti pada akhir periode RPJMD untuk setiap program berkenaan.
  - Kolom (16) diisi dengan total jumlah pendanaan selama periode RPJMD mulai dari tahun-1 sampai dengan tahun-5, yang dibutuhkan untuk mendanai program berkenaan guna mencapai target akhir kinerja program (outcome) yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD.
- Kolom (17) Diisi dengan nama satuan kerja perangkat daerah yang akan bertanggungjawab dan melaksanakan program yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
 Jakarta,



Sae'ulillah  
 1967092111984031002

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) DOKUMEN LPPD  
SESUAI DENGAN LAMPIRAN III.3 SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 120.04/10174/OTDA TENTANG MANUAL  
PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan
<b>Urusan Wajib</b>				
1	Pendidikan	1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$\frac{\text{Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak}}{\text{Jumlah anak usia 4 - 6 tahun}} \times 100 \%$
		2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 thn ke atas}} \times 100 \%$
		3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn}} \times 100 \%$
		4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn}} \times 100 \%$
		5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 16-18 thn dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn}} \times 100 \%$
		6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$
		7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	
		8	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	
		9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$
		10	Angka Kelulusan (AL) SMP/SMA	
		11	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	
		12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$
		13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$
		14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	$\frac{\text{Jumlah guru bertajasi kualifikasi S1/D-IV}}{\text{Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA}} \times 100 \%$
2	Kesehatan	15	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan dituntut di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pd kurun waktu yg sama}} \times 100 \%$
		16	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh asarasan ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama}} \times 100 \%$
		17	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	$\frac{\text{Jumlah Desa / Kelurahan UCI}}{\text{Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan}} \times 100 \%$
		18	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di satu wil. Kerja pd kurun wkt tertentu}}{\text{Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditentukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama}} \times 100 \%$
		19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	$\frac{\text{Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn}}{\text{Jumlah pekiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun wkt yang sama}} \times 100 \%$
		20	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	$\frac{\text{Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn}}{\text{Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun wkt yang sama}} \times 100 \%$
		21	Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan State I}}{\text{Jumlah seluruh miskin di Kota}} \times 100 \%$
		22	Cakupan kunjungan bayi	$\frac{\text{Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pd kurun waktu yang sama}} \times 100 \%$
3	Lingkungan Hidup	23	Penanganan sampah	$\frac{\text{Volume sampah yang ditangani (m3)}}{\text{Volume produksi sampah (m3)}} \times 100 \%$
		24	Kebersihan	$\frac{\text{Jumlah pasar tradisional yang tergolong baik}}{\text{Jumlah seluruh pasar tradisional}} \times 100 \%$
		25	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah daya tampung TPS (m3)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$
		26	Penegakan hukum lingkungan	$\frac{\text{Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan penda}}{\text{Jumlah kasus lingkungan yang ada}} \times 100 \%$
4	Pekerjaan Umum	27	Panjang jalan Kota dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan Kota dalam kondisi mantap (baik dan sedang)}}{\text{Panjang seluruh jalan Kota di daerah tersebut}} \times 100 \%$
		28	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100 \%$
		29	Rumah tangga per-sanitasi	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga bar sanitasi}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100 \%$

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan
21	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	66	PKK Aktif	$\frac{\text{Jumlah PKK aktif}}{\text{Jumlah PKK}} \times 100\%$
		67	Posyandu	$\frac{\text{Jumlah Posyandu Aktif}}{\text{Total Posyandu}} \times 100\%$
22	Sosial	68	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Menunjukkan Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, dll yang terdapat di suatu daerah
		69	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	$\frac{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun}}{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial}} \times 100\%$
		70	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yg diberikan bantuan}}{\text{Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan}} \times 100\%$
23	Budaya	71	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
		72	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya
		73	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan}}{\text{Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah}} \times 100\%$
24	Statistik	74	Buku "Kota dalam angka"	Ada atau tidak
		75	Buku "PDRB Kota"	Ada atau tidak
25	Kearsipan	76	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$
		77	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Menunjukkan Jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan
26	Perpustakaan	78	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	$\frac{\text{Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah}}{\text{Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah}} \times 100\%$
		79	Pengunjung perpustakaan	$\frac{\text{Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun}}{\text{Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani (10-58 thn)}} \times 100\%$
<b>Urusan Pilihan</b>				
1	Kelautan dan Perikanan	1	Produksi perikanan	$\frac{\text{Jumlah Produksi Ikan (Ton/tahun)}}{\text{Target Daerah (Ton/tahun)}} \times 100\%$
		2	Konsumsi Ikan	$\frac{\text{Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)}}{\text{Target Daerah (Kg)}} \times 100\%$
2	Pertanian	3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	$\frac{\text{Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)}}{\text{Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)}} \times 100\%$
		4	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2016	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$
3	Kehutanan	5	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	$\frac{\text{Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi}}{\text{Luas total hutan dan lahan kritis}} \times 100\%$
		6	Kerusakan Kawasan Hutan	$\frac{\text{Luas Kerusakan Kawasan Hutan}}{\text{Luas Kawasan Hutan}} \times 100\%$
4	Energi dan SDM	7	Pertambangan tanpa ijin	$\frac{\text{Luas Penambangan liar yang diterbitkan}}{\text{Luas area penambangan yang liar}} \times 100\%$
		8	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tahun 2016	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pertambangan}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$
5	Pariwisata	9	Kunjungan wisata	Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun
		10	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2016	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$
6	Industri	11	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2016	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Industri}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$
		12	Pertumbuhan Industri	$\frac{\text{Jumlah Industri tahun 2016 - Jumlah Industri tahun 2015}}{\text{Jumlah industri/d tahun 2016}} \times 100\%$
7	Perdagangan	13	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2016	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$
		14	Ekspor Bersih Perdagangan	Nilai ekspor bersih = nilai ekspor - nilai impor
8	Transmigrasi	15	Transmigrasi Swakarsa	$\frac{\text{Jumlah transmigrasi swakarsa}}{\text{Jumlah transmigrasi}} \times 100\%$

